

SURAT TUGAS

Nomor: 927-R/UNTAR/PENELITIAN/II/2022

Rektor Universitas Tarumanagara, dengan ini menugaskan kepada saudara:

HENNY WIRIANTA, S.E., MSi., Ak., CA.

Untuk melaksanakan kegiatan penelitian/publikasi ilmiah dengan data sebagai berikut:

Judul	:	Peran UMKM dalam Mempercepat Pencapaian SDGs Pasca Covid-19
Nama Media	:	Seri Publikasi Ilmiah Kontemporer UNTAR 2021: Aspek Akuntansi dan Pasar Modal di Masa Pandemi Covid-19
Penerbit	:	LPPI Untar
Volume/Tahun	:	Tahun 2021
URL Repository	:	-

Demikian Surat Tugas ini dibuat, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan melaporkan hasil penugasan tersebut kepada Rektor Universitas Tarumanagara

26 Februari 2022

Rektor



Prof. Dr. Ir. AGUSTINUS PURNA IRAWAN

Print Security : a6a0d7c451b63b7f4ab6595cf7620476

Disclaimer: Surat ini dicetak dari Sistem Layanan Informasi Terpadu Universitas Tarumanagara dan dinyatakan sah secara hukum.

SERI PUBLIKASI ILMIAH KONTEMPORER UNTAR 2021



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

S1 Akuntansi

**Aspek Akuntansi dan
Pasar Modal di Masa
Pandemi Covid-19**

EDITOR

Elsa Imelda, S.E., M.Si., Ak., CA.

Rousilita Suhendah, S.E., M.Si., Ak., CA

Hendro Lukman, S.E., M.M., Ak., CPMA, CA, CPA(Aust), CSRS

Henny Wirianata, S.E., M.Si., Ak., CA

SERI PUBLIKASI ILMIAH KONTEMPORER UNTAR 2021

**Aspek Akuntansi dan Pasar Modal
di Masa Pandemi Covid-19**

ISBN : 978-623-6463-08-6

Penerbit

LPPI UNTAR (UNTAR Press)

Lembaga Penelitian dan Publikasi Ilmiah Universitas Tarumanagara

Jln. Letjen. S. Parman No. 1

Kampus I UNTAR, Gedung M, Lantai 5

Jakarta 11440

Email: dppm@untar.ac.id

Keanggotaan IKAPI

No.605/AnggotaLuarBiasa/DKI/2021

Copyright © 2021 Universitas Tarumanagara

SERI PUBLIKASI ILMIAH KONTEMPORER UNTAR 2021

Editor Seri

Dr. Hetty Karunia Tunjungsari, S.E., M.Si.

Ir. Jap Tji Beng, MMSI., Ph.D.

Sri Tiatri, S.Psi, M.Si, Ph.D., Psikolog

Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan, I.P.U., ASEAN Eng.

Aspek Akuntansi dan Pasar Modal

di Masa Pandemi Covid-19

Editor

Elsa Imelda, S.E., M.Si., Ak., CA.

Rousilita Suhendah, S.E., M.Si., Ak., CA

Hendro Lukman, S.E., M.M., Ak., CPMA, CA, CPA(Aust), CSRS

Henny Wirianata, S.E., M.Si., Ak., CA

Penulis

Kevin

Syanti Dewi

Henryanto Wijaya

Elsa Imelda

Widyasari

I Cenik Ardana

Elizabeth Inge Pratiwi

Nataherwin

Jessica Meta Lumanau

Rousilita Suhendah

Anastasya

Henny Wirianata

Agustin Ekadjaja

Verawati

Hendro Lukman

Dwi Egalita Novia M.

Sriwati

I Cenik Ardana

Andreas Bambang D.

Rosmita Rasyid

Karen Thalia

Linda Santioso

Amin Wijoyo

LPPI UNTAR (UNTAR PRESS)

Jakarta, Indonesia

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kasih dan anugerahNya kepada kami semua sehingga kami dapat membuat bookchapter yang berkaitan dengan aspek akuntansi dan pasar modal di masa pandemi covid 19 dengan baik.

Pandemi covid-19 yang melanda di seluruh belahan dunia menyebabkan timbul paradigma tatanan ekonomi, sosial, ilmu dan teknologi yang berbeda dengan era sebelumnya, tidak terkecuali dalam bidang akuntansi. Akuntansi yang merupakan bagian mikro dari ekonomi juga mengalami struktur perubahan dalam penggunaan teknologi informasi terkini. Demikian pula dengan pasar modal yang ada di Indonesia.

Selama masa pandemi covid-19, terjadi penurunan indeks harga saham gabungan pada perusahaan emiten tertentu yang cukup mencolok. Ini dikarenakan di beberapa perusahaan mengalami penurunan pendapatan akibat diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Penurunan penjualan ini menyebabkan kinerja perusahaan menjadi kurang baik yang mengakibatkan terjadinya penurunan harga saham

Covid-19 yang mempengaruhi pola hidup masyarakat terutama sektor ekonomi berdampak juga pada pajak. Pajak sebagai pungutan wajib dari rakyat kepada negara untuk membiayai pengeluaran negara mengalami penurunan. Ini berakibat pada realisasi penerimaan pajak yang semakin berkurang. Pada masa pandemi covid-19 dan meringankan beban hidup masyarakat, pemerintah telah melakukan program relaksasi perpajakan yang dapat memberikan kelegaan baik wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan.

Pembelajaran akuntansi di pendidikan tinggi juga mengalami perubahan. Sebelum terjadinya Covid-19 pembelajaran dilakukan dengan tatap muka (luring), namun pada masa covid-19 ini pembelajaran dilakukan secara daring melalui teknologi informasi yang berkembang dengan cepat. Hal ini membuat dosen dan mahasiswa harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru.

Untar Bersinergi, Untar Bereputasi.
Salam, UNTAR untuk Indonesia

Ketua Program Studi Akuntansi
Universitas Tarumanagara

Elsa Imelda, S.E., M.Si., Ak., CA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1	1-20
<i>Pengaruh Relaksasi Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Perekonomian dalam Perspektif Mahasiswa</i> Hendro Lukman, Kevin	
BAB 2	21-39
<i>Analisis Benford Law Sebagai Pendeteksi Fraud Pada Marketplace di Masa Pandemi Covid-19</i> Elsa Imelda, Elizabeth Inge Pratiwi	
BAB 3	40-86
<i>Pengaruh Covid-19 pada Return Saham Perusahaan Transportasi</i> Rousilita Suhendah	
BAB 4	87-110
<i>Analisis Penerimaan Pajak Selama Pandemi Covid-19 (Studi Kasus pada Pajak Daerah DKI Jakarta)</i> Agustin Ekadjaja, Dwi Egalita Novia Maharani	
BAB 5	111-130
<i>Relaksasi Pajak Sebagai Alternatif Meminimalkan Dampak Ekonomi Akibat Pandemi Covid 19</i> Andreas Bambang Daryatno, Linda Santioso	
BAB 6	131-151
<i>Kepatuhan WPOP Selama Pandemi Covid-19 Dengan Adanya Insentif Pajak</i> Syanti Dewi, Widyasari, Nataherwin, Anastasya	
BAB 7	152-169
<i>CSR Di Masa Pandemi Covid-19</i> Verawati, Sriwati	

BAB 8	170-189
<i>Peranan Strategi Pengelolaan Biaya dalam Akuntansi Manajemen pada Masa Covid- 19</i>	
<i>Rosmita Rasyid</i>	
BAB 9	190-212
<i>Implementasi Media Belajar Online yang Dipakai Dosen Akuntansi Selama Pandemi</i>	
<i>Amin Wijoyo</i>	
BAB 10	213-235
<i>Perkuliahan Akuntansi Masa Covid-19</i>	
<i>Henryanto Wijaya</i>	
BAB 11	236-256
<i>Analisis Kinerja Perbankan Kapitalisasi Saham Besar Sebelum dan Masa Pandemi Covid-19</i>	
<i>I Cenik Ardana, Jessica Meta Lumanau</i>	
BAB 12	257-301
<i>Peran UMKM dalam Mempercepat Pencapaian SDGs Pasca Covid-19</i>	
<i>Henny Wirianata</i>	
BAB 13	302-319
<i>Industri Perhotelan di Indonesia Sebelum dan pada Masa Pandemi Covid-19</i>	
<i>Hendro Lukman, I Cenik Ardana, Karen Thalia</i>	
BAB 14	320-338
<i>Prospek Implementasi SAK EMKM Di Masa Pandemi Covid-19</i>	
<i>Elsa Imelda</i>	

BAB 12

Peran UMKM dalam Mempercepat Pencapaian SDGs Pasca Covid-19

Henny Wirianata

Program Studi S1 Akuntansi, Universitas Tarumanagara

Abstrak

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan 17 tujuan universal yang hendak dicapai negara-negara di dunia agar tercipta pembangunan yang tidak hanya memberikan nilai ekonomi tetapi juga terjaganya lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat dunia. Namun, pandemi Covid-19 yang terjadi sejak akhir tahun 2019 menimbulkan krisis perekonomian global yang mengancam perusahaan besar dan kecil, termasuk UMKM. Pandemi juga berdampak pada pencapaian SDGs dimana hampir semua target dalam SDGs mengalami keterlambatan pencapaian. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan salah satu penggerak utama perekonomian baik di dunia maupun di Indonesia. International Trade Centre (ITC) menyebutkan bahwa UMKM memiliki kontribusi terhadap pencapaian SDGs khususnya tujuan 8 dan 9. Membangkitkan kembali UMKM sebagai roda penggerak perekonomian diharapkan akan memban gkitkan kembali perekonomian di Indonesia yang didukung dengan kebijakan-kebijakan strategis dan kerjasama semua pihak. Pulihnya kondisi perekonomian akan mendorong pencapaian SDGs kembali pada Peta Jalan (Road Map) yang sudah direncanakan yang mengarah pada “Build Back Better”.

Kata kunci: UMKM, Sustainable Development Goals, Covid-19

1.1 Pendahuluan/ Latar Belakang

Sustainable Development (Pembangunan Berkelanjutan) adalah pembangunan untuk memenuhi kebutuhan hidup generasi sekarang tanpa mengganggu kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka [1]. *Sustainable development* menjadi awal pembangunan yang mencakup tiga elemen *triple bottom line* yaitu *people*, *profit*, dan *planet*. *Triple bottom line* diperkenalkan oleh John Elkington (1994) yang merupakan suatu kerangka akuntansi yang dikembangkan dari *sustainable development* dimana pelaporan keuangan perusahaan akan dilengkapi dengan satu laporan yang memberikan informasi tentang pencapaian perusahaan terkait bidang sosial dan yang berkaitan dengan kepedulian terhadap lingkungan [2].

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan tujuan-tujuan pembangunan universal/global yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, kualitas lingkungan hidup, serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola [3]. SDGs disepakati oleh 193 kepala negara dari seluruh dunia dalam Sidang Umum PBB tanggal 25 September 2015. SDGs merupakan penyempurnaan dari *Millenium Development Goals* (MDGs). MDGs dan SDGs muncul sebagai bentuk respon negara-negara dunia atas keprihatian kegiatan pembangunan yang tanpa disadari telah menimbulkan kerusakan lingkungan dan mengancam keberadaan manusia di masa depan. SDGs berfokus pada pencapaian 17 tujuan, 169 target dengan 241 indikator untuk 15 tahun ke depan yang diharapkan dicapai pada 2030 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan salah satu penggerak utama perekonomian baik di dunia maupun di Indonesia. Pada tahun 2018, kontribusi UMKM di Indonesia mencapai 99,99% dari populasi industri di Indonesia [4]. UMKM di Indonesia memiliki 3 peranan utama. UMKM memperluas kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia yang mencapai 97%. UMKM di

Indonesia berkontribusi membentuk Produk Domestik Bruto (PDB) hingga 61,07%. Selain itu, UMKM di Indonesia menjadi jarring pengaman terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah untuk menjalankan kegiatan ekonomi produktif.

Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak akhir tahun 2019 menimbulkan krisis perekonomian global. Pertumbuhan ekonomi di berbagai negara di dunia mengalami penurunan bahkan negatif, termasuk di Indonesia. Seluruh sektor industri baik dalam skala besar maupun kecil mengalami penurunan kegiatan produksi bahkan terpaksa menutup operasionalnya. Tidak terkecuali UMKM di Indonesia yang selama ini menjadi jaring pengaman kegiatan perekonomian masyarakat. Saat krisis ekonomi pada tahun 1997-1998, UMKM terbukti berhasil menjadi penyelamat dan roda penggerak bangkitnya perekonomian di Indonesia. Tetapi pada masa pandemi saat ini, UMKM di Indonesia turut mengalami kemerosotan.

International Trade Centre (ITC) (2020) menyebutkan UMKM memiliki kontribusi terhadap pencapaian SDGs khususnya target 8 “Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi” dan target 9 “Industri, inovasi dan infrastruktur” [5]. Namun, pandemi Covid-19 membawa dampak yang besar dalam pencapaian SDGs dimana hampir semua target dalam SDGs terancam mengalami keterlambatan pencapaian.

Target SDGs yang paling terdampak adalah yang berkaitan dengan upaya menghapus kemiskinan, terganggunya produksi dan tersedianya makanan sehat, terancamnya pencapaian kehidupan yang sehat dan sejahtera, pendidikan yang berkualitas, ketidaktersediaan lapangan pekerjaan dan banyak sektor usaha yang ditutup. Target yang terdampak lagi adalah yang berkaitan dengan kesetaraan

gender dan timbulnya konflik baik dalam negeri maupun dengan luar negeri. Diperlukan kerjasama dari semua pihak, yaitu pemerintah dan pelaku usaha agar kondisi perekonomian bangkit kembali dan berdampak positif pada pencapaian target-target dalam SDGs. Selain itu diperlukan kebijakan-kebijakan strategis dan kerjasama semua pihak baik di dalam negeri maupun di luar negeri agar pandemi segera berakhir dan kondisi perekonomian pulih sehingga pencapaian SDGs akan kembali pada Peta Jalan (*Road Map*) yang sudah direncanakan yang mengarah pada “*Build Back Better*”.

Pandemi Covid-19 memberikan gambaran bagaimana rentannya kehidupan manusia di bumi dan menyebabkan pada perubahan pola hidup dan perilaku manusia. Kebangkitan ekonomi global menjadi kunci utama dalam mengembalikan pencapaian SDGs. Tulisan ini bertujuan untuk memaparkan peranan UMKM dalam mendorong kebangkitan ekonomi nasional dan mendukung pencapaian SDGs di Indonesia pasca pandemi Covid-19. Pemaparan materi dilakukan berdasarkan hasil studi literatur/studi pustaka terkait UMKM dan pencapaian SDGs di Indonesia.

1.2 Isi/Pembahasan

Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia

Prinsip pertama dalam pencapaian SDGs adalah *Universal* yaitu pembangunan dengan melibatkan semua negara baik negara besar maupun negara berkembang. Prinsip kedua adalah *Integrasi* dimana setiap tujuan dalam SDGs saling berkaitan dan saling mendukung, pencapaiannya dilaksanakan secara terintegrasi pada semua dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan, sehingga pencapaian pada salah satu tujuan akan berdampak pada pencapaian tujuan-tujuan yang lain. Prinsip terakhir adalah *Inklusif*, yaitu pelaksanaan pencapaian SDGs dengan melibatkan semua pemangku kepentingan serta memberi manfaat untuk kepentingan bersama terutama yang rentan, yang mencakup kesejahteraan

untuk semua, tidak diskriminasi, tidak membedakan gender, pendidikan untuk semua, kesehatan untuk semua, lingkungan yang terjaga, dan tercapainya tujuan-tujuan lain dalam SDGs. Semua prinsip tersebut untuk memastikan bahwa tidak ada seorangpun yang tertinggal atau yang lebih dikenal dengan istilah “*no one left behind*”. Platform pelaksanaan TPB/SDGs di Indonesia melibatkan peranan 4 pihak yaitu pemerintah dan parlemen, akademisi dan pakar, ormas dan media, serta filantropi dan pelaku usaha. Masing- masing pihak memberikan dukungan dalam pelaksanaan pencapaian SDGs sesuai fungsi masing- masing (lihat Gambar 1.1).



Gambar 1.1 Platform Pelaksanaan TPB/SDGs di Indonesia [6]

Untuk memudahkan pelaksanaan pencapaiannya, Indonesia mengelompokkan 17 tujuan TPB/SDGs ke dalam empat pilar pembangunan, yaitu pilar pembangunan sosial, pilar pembangunan ekonomi, pilar pembangunan lingkungan, dan pilar pembangunan hukum dan tata kelola yang dijabarkan sebagai berikut:

a. Pilar Pembangunan Sosial

Mencakup tujuan 1, 2, 3, 4, dan 5



Gambar 1.2 Platform Pelaksanaan TPB/SDGs di Indonesia [7]

b. Pilar Pembangunan Ekonomi

Mencakup tujuan 7, 8, 9, 10, dan 17



Gambar 1.3 TPB/SDGs dalam Pilar Pembangunan Ekonomi [8]

c. Pilar Pembangunan Lingkungan

Mencakup tujuan 6, 11, 12, 13, 14, dan 15



Gambar 1.4 Platform Pelaksanaan TPB/SDGs di Indonesia [9]

d. Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola

Mencakup tujuan 16



Gambar 1.5 TPB/SDGs dalam Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola [10]

Untuk mendukung pencapaian SDGs di Indonesia, pemerintah Indonesia telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 dan 2020-2024 dimana substansi dari masing-masing target dalam TPB/SDGs telah diintegrasikan dan diselaraskan dengan program-program pembangunan pemerintah dalam RPJMN. Sampai saat ini, sebanyak 124 target dari TPB/SDGs telah terintegrasi dalam RPJMN tahun 2020-2024. Hal ini sebagai bentuk komitmen Pemerintah Indonesia untuk mensukseskan pencapaian TPB/SDGs di Indonesia dan sebagai bentuk dukungan Indonesia untuk pencapaian agenda SDGs tahun 2030 secara global [11] Untuk pelaksanaannya telah diatur dalam Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) yang dijabarkan dalam Peta Jalan TPB/SDGs, Rencana Aksi Nasional (RAN) TPB/SDGs yang ditetapkan dalam Permen PPN/Kepala Bappenas No. 7 Tahun 2018, dan Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs Provinsi.

Dalam tahun 2019, Indonesia telah mengukir prestasi sebanyak 146 indikator (52%) telah mencapai target yang ditetapkan pada RAN 2017-2019 yang terdiri dari 39 indikator dalam pilar sosial, 48 indikator dalam pilar ekonomi, 42 indikator dalam pilar lingkungan. Serta 17 indikator dalam pilar hukum dan tata kelola (lihat Gambar 1.6). Tahun 2020, pencapaian SDGs Indonesia berada pada

posisi 101 dunia, naik satu peringkat yang sebelumnya di posisi 102 dunia [12]. Posisi Indonesia ini berada pada posisi ke-4 di Asia Tenggara setelah Thailand, Malaysia, dan Filipina.

Perjalanan pencapaian SDGs di Indonesia juga telah mendapat apresiasi secara internasional. Indonesia telah beberapa kali menyampaikan *Voluntary National Reviews* (VNR) dalam acara *High-Level Political Forum on Sustainable Development* (HLPF SD) di kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). VNR merupakan dokumen laporan capaian TPB/SDGs untuk tingkat global yang menjabarkan capaian atas 17 Tujuan (*Goals*) di Indonesia yang disusun dengan prinsip keterbukaan dan inklusif. Laporan tersebut disusun dengan melibatkan pihak-pihak pemerintah dan non pemerintah. PBB menilai dan menetapkan bahwa VNR Indonesia tahun 2017 merupakan salah satu VNR terbaik sehingga Indonesia menjadi salah satu negara yang diundang dalam SDG Investment Fair 2019 [13].



Gambar 1.6 Pencapaian TPB/SDGs Indonesia Tahun 2019 [13]

Meskipun pandemi Covid-19 berdampak pada pencapaian SDGs di Indonesia, namun beberapa tujuan dalam SDGs tetap menunjukkan kinerja pencapaian yang dikaitkan dengan program pemulihan ekonomi di Indonesia. VNR Indonesia tahun 2021 mengusung tema “*Sustainable and resilient recovery from the COVID-19 pandemic for the achievement of the 2030 Agenda*” dan terfokus menjabarkan pencapaian tujuan 1, 2, 3, 8, 10, 12, 13, 16, dan 17. Seluruh pencapaian tersebut menggambarkan reformasi kebijakan nasional yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam mempercepat pencapaian SDGs pasca pandemi yang terbagi dalam empat strategi reformasi yaitu *Industry Recovery*, *Tourism And Investment Towards Green Economy*, *Disaster Resilience System*, *National Health System*, dan *Social Protection System* [14].

Peran UMKM dalam Pencapaian SDGs

Seluruh target dalam SDGs dapat tercapai dengan adanya perubahan-perubahan dalam aktivitas bisnis yang dilakukan semua industri, termasuk juga perubahan-perubahan pada masyarakat. *United Nations Department of Economic and Social Affairs* (UNDESA) menjelaskan perubahan-perubahan tersebut adalah dengan menerapkan model bisnis yang berkelanjutan (*sustainable business model*) [15]. Model bisnis yang berkelanjutan ditunjukkan dari kemampuan perusahaan dalam melakukan adaptasi model bisnis yang baru, melakukan inovasi dan penggunaan teknologi baru, seperti teknologi ramah lingkungan, dan melakukan bisnis secara berbeda yaitu dengan lebih berkelanjutan dan lebih beretika. Perubahan-perubahan tersebut akan membuka peluang bisnis yang baru tidak hanya bagi perusahaan besar tetapi juga bagi UMKM. *Sustainable Development Commission* menyebutkan bahwa model bisnis berkelanjutan dapat membuka peluang di bidang ekonomi yang bernilai \$12 triliun dan mampu menciptakan 380 juta peluang kerja baru pada tahun 2030 dimana lebih dari 50% akan bersumber dari negara-negara berkembang [15].

International Trade Centre (ITC) menyebutkan bahwa kontribusi UMKM terhadap pencapaian SDGs didasari dari adanya nilai kompetitif/daya saing yang dimiliki UMKM. UMKM memiliki keterbatasan dari segi pendanaan. Oleh karena itu, diperlukan stimulus bagi UMKM dalam bentuk pendanaan investasi di UMKM agar UMKM memiliki nilai kompetitif. ITC dalam analisisnya mengungkapkan bahwa investasi dan pendanaan bagi UMKM akan memberikan kontribusi tercapainya 60% dari 169 target SDGs [5].



Gambar 1.7 7 Kontribusi dan Peranan UMKM dalam Pencapaian SDGs [5]

UMKM berkontribusi dan memberi pengaruh pada pencapaian SDGs dilihat dari empat hal, yaitu pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja, pengaruh terhadap praktek bisnis, pengaruh terhadap sektor-sektor tertentu, dan pengaruh terhadap ekonomi nasional [5]. Pengaruh UMKM terhadap pencapaian seluruh SDGs dapat dilihat pada Gambar 1.7 di atas. Dari semua dampak terhadap SDGs, UMKM memiliki kontribusi terbesar terhadap pencapaian SDGs khususnya target 8 “Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi” dan target 9 “Industri, inovasi dan infrastruktur.

UMKM dapat mempengaruhi pencapaian SDGs yang berkaitan dengan penyerapan tenaga kerja karena UMKM dapat menjadi sumber pertumbuhan, inovasi, dan penciptaan lapangan pekerjaan baru. Dalam ekonomi global, UMKM mampu menyerap 60%-70% tenaga kerja di tiap negara [5]. Bank Dunia (*World Bank*) dan *The Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) menyebutkan bahwa UMKM mampu membuka 4 dari 5 (90%) lapangan pekerjaan baru [16]. Kemampuan UMKM dalam menyerap tenaga kerja akan berkontribusi pada pencapaian SDGs untuk tujuan 1, 2, 3, dan 8. Dukungan pendanaan bagi UMKM akan memungkinkan UMKM menciptakan pekerjaan yang layak dan memberikan upah yang memadai sehingga secara signifikan akan mengurangi kemiskinan dan ketimpangan dalam masyarakat. UMKM akan berkontribusi mendorong terciptanya kualitas hidup yang lebih baik, sehingga membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mengakses pendidikan dan kesehatan [16].

UMKM juga akan memberikan pengaruh pada praktek bisnis yang terjadi di masyarakat dan berkontribusi pada pencapaian SDGs untuk tujuan 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, dan 16. Pemilik UMKM dapat menjalankan usaha mereka dengan memperhatikan pengaruhnya terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Seperti membuka lapangan pekerjaan dengan mengedepankan kesetaraan gender, mengembangkan usaha yang hemat energi dan ramah lingkungan, serta melakukan produksi dan konsumsi yang bertanggungjawab [5]. Selain sebagai penyedia jasa, UMKM juga dapat berperan menjadi pengguna yang memiliki pola konsumsi yang berkelanjutan dan peduli pada lingkungan. UMKM juga membantu mengurangi kesenjangan dalam pertumbuhan ekonomi khususnya di daerah perdesaan atau di daerah dimana terdapat kelompok-kelompok masyarakat miskin atau yang kurang beruntung secara sosial [16], seperti memberdayakan masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik. Secara tidak langsung, UMKM akan menciptakan rasa damai dan keadilan di masyarakat.

UMKM dapat membuka lapangan pekerjaan dengan menyediakan jasa profesional di bidang kesehatan, pendidikan, air dan sanitasi, sektor manufaktur, pertanian, serta energi. Keberadaan UMKM pada berbagai bidang usaha dapat berkontribusi pada pencapaian SDGs tujuan 2, 3, 4, 6, 7, 9, dan 11. Dengan tidak ada pembatasan pada bidang usaha yang dijalankan UMKM, maka semakin besar kesempatan masyarakat dari berbagai golongan untuk mengakses dan mendapatkan pekerjaan layak.

UMKM memegang peranan penting dalam ekonomi nasional di tiap-tiap negara dan berkontribusi pada pencapaian SDGs untuk tujuan 1, 8, 9, 10, dan 17. Bank Dunia dan OECD mengungkapkan bahwa di negara-negara berkembang, UMKM formal memberikan kontribusi penyerapan tenaga kerja hampir 45% dan berkontribusi terhadap pencapaian *Gross Domestic Product* (GDP) hingga 33% [16]. UMKM harus dapat beroperasi dengan menciptakan nilai (*value-creating*) untuk mendorong terciptanya persaingan, inovasi, diversifikasi, dan bahkan perdagangan berskala internasional [5]. UMKM dapat berinovasi dengan membuka model bisnis berkelanjutan yang peduli pada lingkungan dan melibatkan masyarakat sekitar. Dengan mengembangkan usaha baik di perkotaan maupun di perdesaan, secara tidak langsung UMKM juga akan mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi.

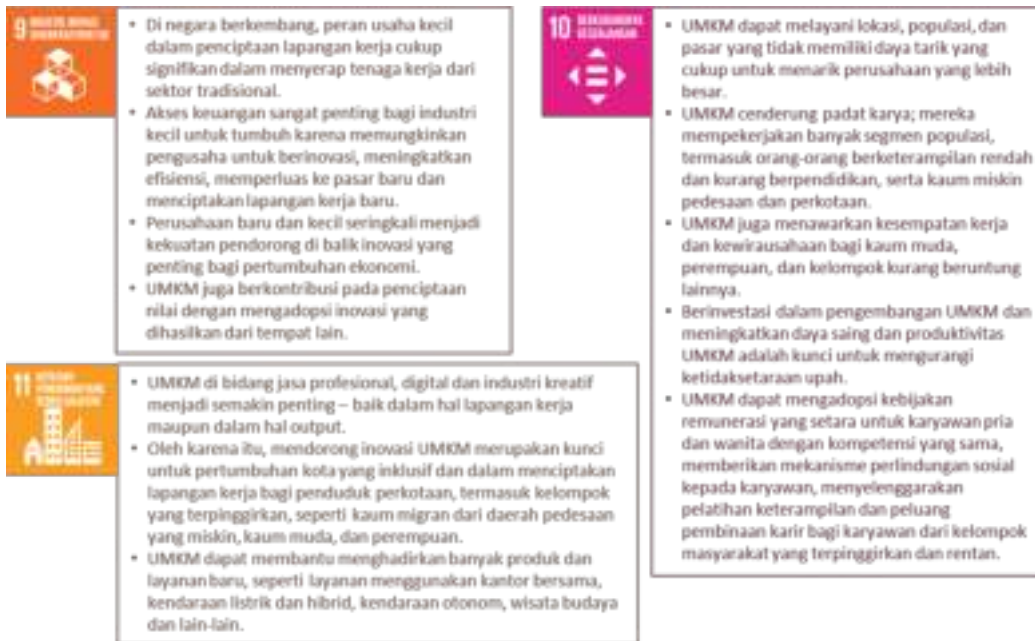
Peranan UMKM dalam mencapai masing-masing tujuan SDGs dijelaskan pada Gambar 1.8, 1.9, 1.10, 1.11 dan 1.12 di bawah ini.



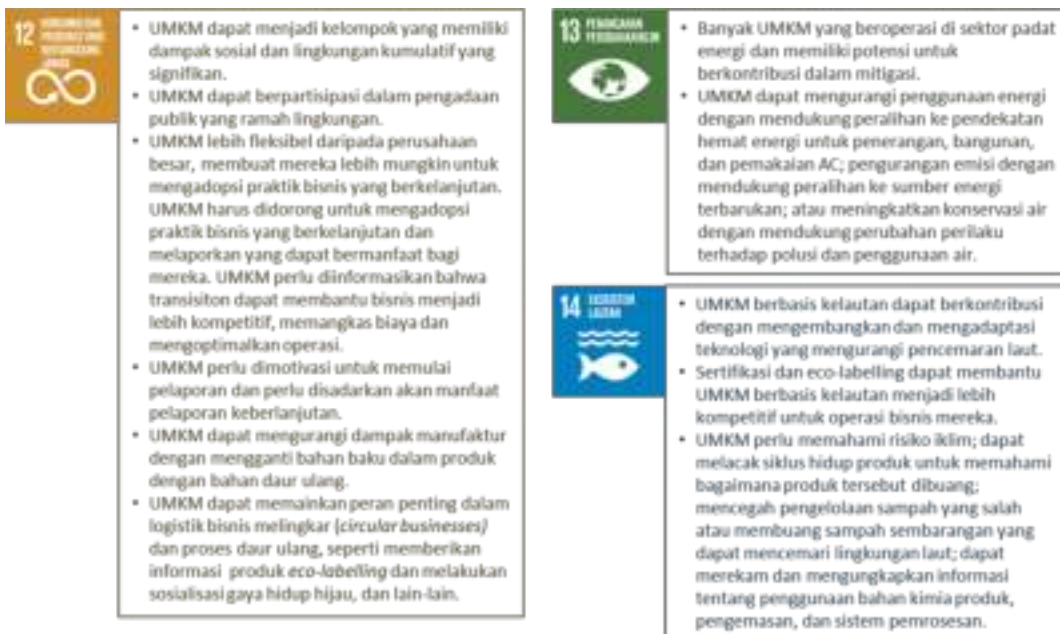
Gambar 1.8 Peran UMKM dalam Pencapaian SDGs Untuk Tujuan 1, 2, 3, dan 4 [15]



Gambar 1.9 Peran UMKM dalam Pencapaian SDGs Untuk Tujuan 5, 6, 7, dan 8 [15]



Gambar 1.10 Peran UMKM dalam Pencapaian SDGs Untuk Tujuan 12, 13, dan 14 [15]



Gambar 1.11 Peran UMKM dalam Pencapaian SDGs Untuk Tujuan 12, 13, dan 14 [15]



Gambar 1.12 11 12 Peran UMKM dalam Pencapaian SDGs Untuk Tujuan 15, 16, dan 17 [15]

Dampak Covid-19 Terhadap Pencapaian SDGs

Pandemi Covid-19 sejak akhir tahun 2019 menimbulkan efek ganda pada kehidupan manusia di dunia. Krisis pandemi Covid-19 menimbulkan dampak yang tidak pernah muncul sebelumnya, yaitu krisis kesehatan, krisis ekonomi, dan krisis sosial. Dunia menghadapi krisis kesehatan global akibat penyebaran virus Covid-19 yang mengancam kehidupan manusia. Krisis kesehatan ini menimbulkan krisis kemanusiaan. Pandemi Covid-19 seolah menyadarkan bagaimana rentannya kehidupan manusia di bumi.

Kehidupan sosial masyarakat dunia pun mengalami perubahan drastis karena harus melakukan *Physical Distancing* dan membatasi kegiatan di luar rumah. Pembatasan kegiatan menyabatkan perekonomian dunia mengalami keterpurukan sehingga menimbulkan krisis ekonomi global. Setiap unsur masyarakat dipaksa untuk bekerja dari rumah (*work from home*) dan kegiatan pendidikan dilakukan dari rumah (*school from home*). Kondisi ini mendorong era digitalisasi datang lebih cepat dan merubah pola hidup dan pola konsumsi masyarakat.

Pencapaian seluruh target dalam SDGs diharapkan terwujud pada tahun 2030. Pandemi Covid-19 menyebabkan terjadinya disrupsi dan keterlambatan pada pencapaian target-target tersebut. UN memaparkan ada 13 tujuan dalam SDGs yang terdampak pencapaiannya karena pandemi Covid-19 [18]. Dampak utamanya adalah terganggunya pencapaian tujuan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 16, dan 17. Terganggunya pencapaian tujuan 4, 5, 8, dan 11 berdampak secara tidak langsung pada pencapaian tujuan 10. Dampak pandemi terhadap 13 tujuan tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.13.



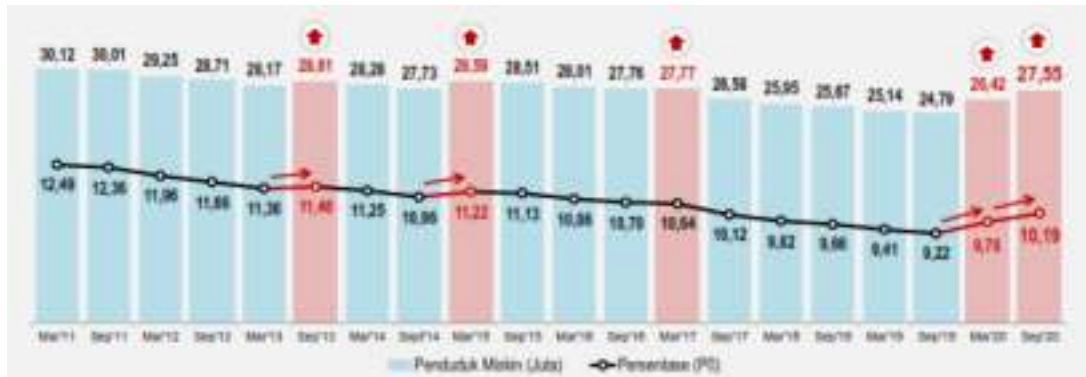
Gambar 1.13 Dampak Covid-19 Terhadap SDGs [18]

Sementara, Filho, et. al. dalam penelitiannya mengemukakan pandemi Covid-19 berdampak pada pencapaian tujuan-tujuan SDGs dimana dampak utamanya adalah terhadap tujuan 1, 2, 3, 4, 5, 8,10, dan 16 [19]. Gambar 1.14 di bawah ini menjabarkan hasil penelitian Filho, et. al. terkait dampak Covid-19 terhadap SDGs.



Gambar 1.14 Dampak Covid-19 Terhadap SDGs [18]

Terpuruknya kegiatan perekonomian menyebabkan banyak orang yang kehilangan pekerjaan dan penghasilan dan bertambahnya tingkat kemiskinan di berbagai negara. Kondisi ini mengancam tercapainya tujuan 1 yaitu untuk mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun. Sejak pandemi, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia pada Agustus 2020 adalah sebesar 7,07%, mengalami kenaikan sebesar 1,84% dibandingkan Agustus 2019 yang sebesar 5,23%. Jumlah penduduk miskin di Indonesia juga bertambah sebanyak 27,55 juta orang pada September 2020, naik 1,13 juta orang dibandingkan dengan Maret 2020 dan naik 2,76 juta orang dibandingkan dengan September 2019. Persentase penduduk miskin pada September 2020 sebesar 10,19%, yaitu mengalami kenaikan 0,41% dibandingkan Maret 2020 dan naik 0,97% dibandingkan September 2019 [20]. Gambar 1.15 memperlihatkan perkembangan kemiskinan di Indonesia dimana telah mengalami penurunan terus menerus sebelum terjadi pandemi, namun meningkat kembali sejak pandemi terjadi.



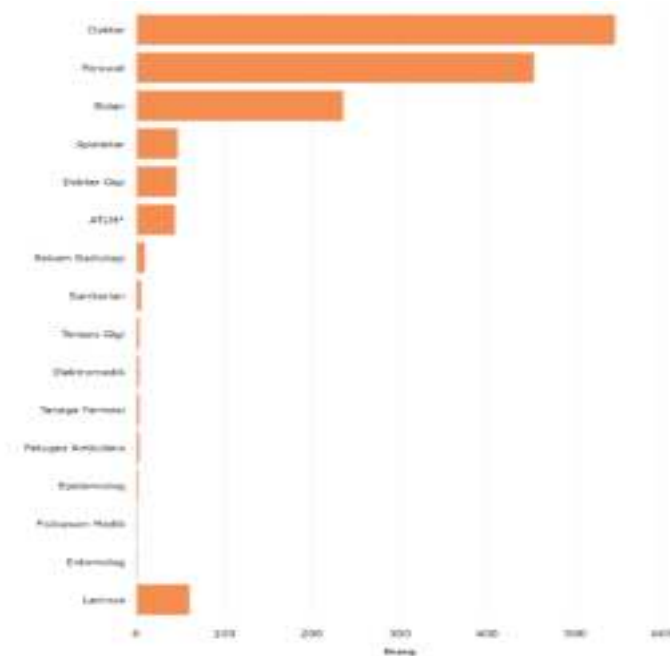
Gambar 1.15 Perkembangan Kemiskinan di Indonesia
Maret 2011 – September 2020 [20]

Kenaikan pada tingkat kemiskinan di Indonesia terjadi lebih parah di perkotaan dibandingkan di perdesaan, yaitu di perkotaan mengalami kenaikan 1,32% dan di perdesaan naik 0,60% dalam rentang waktu sejak September 2019 hingga September 2020 (lihat Gambar 1.16).



Gambar 1.16 Peningkatan Kemiskinan di Perkotaan dan di Perdesaan [20]

Pandemi menyebabkan adanya disrupsi pada pencapaian tujuan 2. Banyak negara melakukan *lockdown* dan pembatasan kegiatan sehingga terjadi keterlambatan pada produksi dan distribusi pangan. Sejak terjadinya pandemi COVID-19, industri pengolahan di Indonesia mengalami penurunan kinerja. Hal ini dikarenakan masih tingginya ketergantungan dalam memperoleh bahan baku dari Cina yang mana negara tersebut menjadi pusat wabah pandemi. Rantai pasokan global terganggu termasuk rantai pasokan di Indonesia. Banyak industri pengolahan yang mengalami keterlambatan produksi bahkan mengalami penipisan pasokan bahan baku [21]. Bertambahnya pengangguran menyebabkan semakin banyak masyarakat yang mengalami penurunan dan kehilangan pendapatan sehingga berkurangnya akses untuk mendapatkan pangan dan gizi yang baik.



Gambar 1.17 Jumlah Tenaga Kesehatan di Indonesia yang Meninggal Karena Covid-19 per 21 Juli 2021 [22]

Disrupsi juga terjadi pada tujuan 3. Cepatnya penyebaran virus Covid-19 menimbulkan efek buruk pada kesehatan masyarakat dunia. Mereka yang terdampak dan yang tidak terdampak virus harus melakukan isolasi untuk mencegah penyebaran yang lebih luas. Fasilitas kesehatan di berbagai negara mengalami kelebihan kapasitas (*overcapacity*) dengan jumlah dokter dan tenaga kesehatan yang terbatas, bahkan mengalami kekurangan karena banyak dari dokter dan tenaga kesehatan yang harus melakukan isolasi akibat terdampak virus bahkan banyak yang meninggal. Sampai dengan 21 Juli 2021 tercatat sebanyak 1.459 tenaga kesehatan di Indonesia meninggal karena Covid-19 [22] (lihat Gambar 1.34). Bekerja dan belajar dari rumah juga menimbulkan efek buruk pada kesehatan mental masyarakat.

Tujuan 4 untuk mencapai pendidikan yang berkualitas justru mengalami penurunan selama pandemi. Pandemi menyebabkan banyak sekolah dari jenjang paling rendah sampai tingkat sekolah tinggi/universitas harus tutup dan melakukan pembelajaran *online*/jarak jauh. Pembelajaran *online* menjadi tidak efektif karena ketidaksiapan baik tenaga pendidik maupun peserta didik. Keterbatasan pada akses internet juga menyebabkan pembelajaran tidak dapat diakses oleh semua peserta didik. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengungkapkan 50% peserta didik di luar Jawa tidak terlayani pembelajaran jarak jauh (PJJ) karena ketiadaan sarana teknologi (tidak memiliki laptop, smartphone, kuota internet) hingga jaringan internet yang tidak stabil, serta adanya kesenjangan dalam pelaksanaan PJJ dimana peserta didik dari kelas menengah ke atas cenderung lebih siap dan lebih mampu untuk mengikuti proses PJJ [23].

Selama pandemi, masyarakat perempuan juga lebih rentan mengalami kekerasan karena harus mendampingi suami yang mungkin mengalami pemutusan kerja. Kaum perempuan juga lebih rentan mengalami tekanan karena pengaruh bekerja dari rumah dan di saat yang bersamaan harus mendampingi anak-anaknya sekolah dari rumah. Tenaga medis yang banyak didominasi kaum perempuan juga menyebabkan banyak kaum perempuan harus tinggal jauh dari keluarga karena tuntutan pekerjaan dan isolasi selama pandemi. Kondisi ini menyebabkan timbulnya ketidakadilan bagi kaum perempuan dan terancamnya pencapaian tujuan 5.

Selain itu, *physical distancing* dan pembatasan kegiatan masyarakat di luar rumah juga membatasi akses pelayanan air bersih dan sanitasi yang layak di beberapa daerah tertentu sehingga berdampak pada kondisi kesehatan masyarakat (tujuan 6). Begitu pula dengan adanya keterbatasan akses pelayanan pada fasilitas listrik dan energi (tujuan 7). Keterbatasan tersebut karena menurunnya ketersediaan tenaga kerja atau personil yang dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Sejak diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar/PSBB di Indonesia pada awal pandemi hingga diberlakukannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), banyak perusahaan yang terpaksa menghentikan kegiatannya bahkan menutup usahanya. Akibatnya banyak yang mengalami penurunan pendapatan, sedikitnya waktu kerja, dan bahkan merumahkan dan pemutusan kerja pada karyawan (tujuan 8). Keberlanjutan pembangunan di beberapa desa dan kota juga mengalami perlambatan karena risiko penularan dari penyebaran virus Covid-19 (tujuan 11). Disrupsi pada tujuan 4, 5, 8, dan 11 secara tidak langsung menimbulkan disrupsi pada pencapaian tujuan 10 untuk mengurangi kesenjangan.

Dengan terjadinya pandemi juga menimbulkan disrupsi pada komitmen untuk

mengurangi dampak perubahan iklim karena tiap negara di dunia fokusnya beralih untuk menetapkan kebijakan dan mengambil tindakan agar dapat keluar dari krisis pandemic (tujuan 13). Namun, pandemi membawa dampak positif terhadap kondisi lingkungan. Pembatasan kegiatan diluar rumah memberikan dampak positif terhadap lingkungan yaitu berkurangnya tingkat polusi (lihat Gambar 1.35), lingkungan mulai asri kembali, lubang ozon mulai tertutup kembali, dan memberikan dampak positif pada kehidupan manusia di bumi yaitu membuka tren baru dan meningkatkan solidaritas kemanusiaan antar negara [24].

Negara-negara yang sedang mengalami konflik akan memberikan dampak menurunkan efektivitas penanggulangan pandemi. Oleh karena itu tujuan 17 untuk mewujudkan perdamaian semakin sulit untuk dicapai jika konflik masih terjadi.



Gambar 1.18 Infografis Penurunan Polusi Udara di Dunia Saat Pandemi [25]

Peran UMKM Dalam Mempercepat Pencapaian SDGs Pasca Covid-19

Populasi UMKM di Indonesia pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 65.465.497 UMKM dari sebelumnya 64.194.057 UMKM (lihat Tabel 1.1). Jumlah tersebut mencapai 99,99% dari populasi industri di Indonesia [4]. Penyerapan tenaga kerja oleh UMKM juga mengalami peningkatan di tahun 2019 menjadi sebanyak 119.562.843 orang, namun dari % mengalami penurunan menjadi 96,92% dibandingkan tahun 2018 yaitu sebesar 97%. Tahun 2019, kontribusi UMKM terhadap tingkat PDB mencapai 9.580.762,7 milyar rupiah atau turun dari 61,07% di tahun 2018 menjadi 60,51% di tahun 2019 [4]. Meskipun mengalami sedikit penurunan persentase, namun nilai-nilai tersebut menunjukkan

masih besarnya peranan UMKM terhadap perekonomian Indonesia.

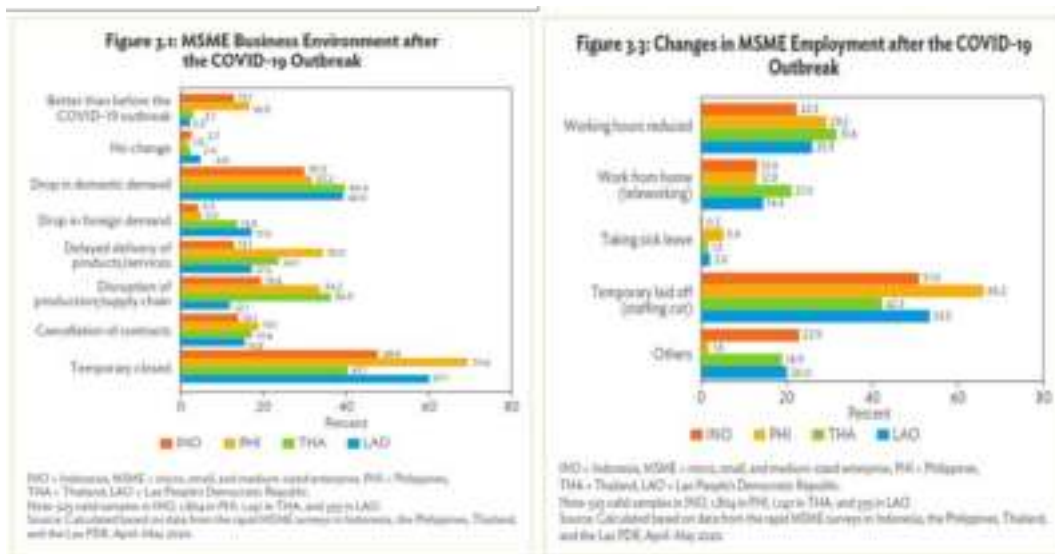
INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2018		TAHUN 2019		PERKEMBANGAN	
		JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
Unit usaha	Unit	64.199.606		65.471.134		1.271.528	1,98
A. UMKM	Unit	64.194.057	99,99	65.465.497	99,99	1.271.440	1,98
Usaha Mikro (UM)	Unit	63.350.222	98,68	64.601.352	98,67	1.251.130	1,97
Usaha Kecil (UK)	Unit	783.132	1,22	798.679	1,22	15.547	1,99
Usaha Menengah (UM)	Unit	60.702	0,09	65.465	0,10	4.763	7,85
B. Usaha Besar (UB)	Unit	5.550	0,01	5.637	0,01	87	1,58
Tenaga Kerja	Orang	120.598.138		123.368.672		2.770.534	2,30
A. UMKM	Orang	116.978.631	97,00	119.562.843	96,92	2.584.212	2,21
Usaha Mikro (UM)	Orang	107.376.540	89,04	109.842.384	89,04	2.465.844	2,30
Usaha Kecil (UK)	Orang	5.831.256	4,84	5.930.317	4,81	99.061	1,70
Usaha Menengah (UM)	Orang	3.770.835	3,13	3.790.142	3,07	19.307	0,51
B. Usaha Besar (UB)	Orang	3.619.507	3,00	3.805.829	3,08	186.322	5,15
PDB	Rp Milyar	14.837.756,0		15.832.535,4		997.779,4	6,70
A. UMKM	Rp Milyar	9.062.581,3	61,07	9.580.762,7	60,51	518.181,3	5,72
Usaha Mikro (UM)	Rp Milyar	5.605.334,9	37,77	5.913.246,7	37,35	307.911,8	5,49
Usaha Kecil (UK)	Rp Milyar	1.423.885,1	9,60	1.508.970,1	9,53	85.085,0	5,98
Usaha Menengah (UM)	Rp Milyar	2.033.361,3	13,70	2.158.545,8	13,63	125.184,5	6,16
B. Usaha Besar (UB)	Rp Milyar	5.776.174,7	38,93	6.251.772,7	39,49	475.598,1	8,23

Tabel 1.1 Data UMKM tahun 2018-2019 [4]

Selama pandemi, UMKM khususnya di negara berkembang berjuang untuk dapat tetap bertahan. Pada awal pandemi Covid-19, *Asian Development Bank* (ADB) melakukan penelitian di kawasan Asia dan Pacific dan menemukan beberapa dampak pandemi Covid-19 terhadap kegiatan operasional UMKM di Indonesia, Filipina, Thailand, dan Laos.

Dampak pertama adalah UMKM mengalami perubahan pada lingkungan bisnis dan operasionalnya. Perubahan-perubahan tersebut diantaranya adalah menurunnya jumlah permintaan, terjadinya penundaan dan disrupsi pada rantai produksi, tertundanya pengiriman produk kepada pelanggan, pembatalan pesanan, dan menutup sementara usaha mereka. Namun, ada pula UMKM yang tidak

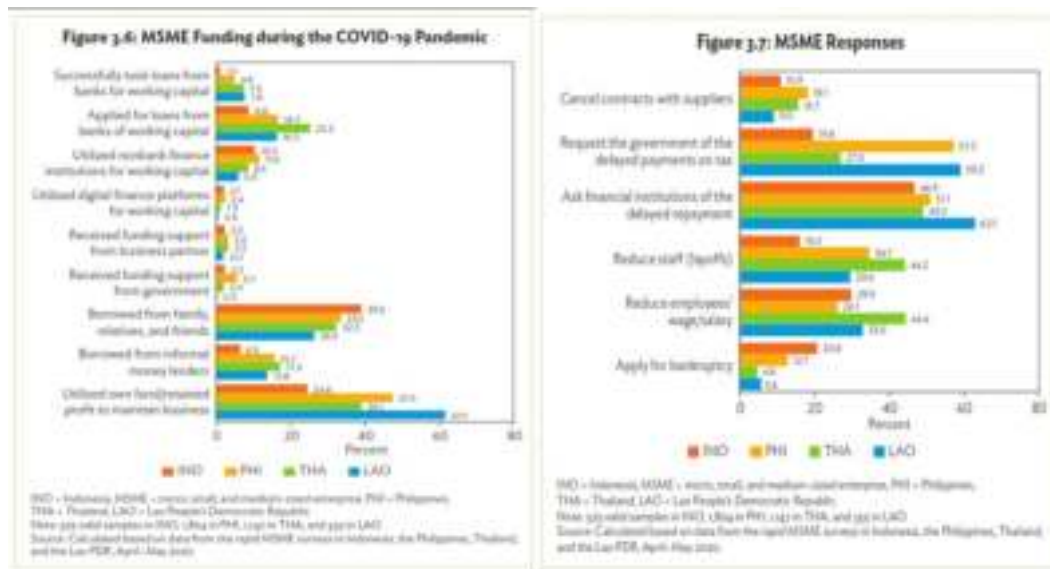
mengalami perubahan apapun bahkan mengalami perubahan operasional yang lebih baik. Dampak berikutnya adalah terjadinya perubahan pada pola *employment* atau pekerjaan UMKM. Adanya pembatasan kegiatan mendorong UMKM melakukan sejumlah perubahan pada pekerjaan yang dilakukan seperti mengurangi jumlah jam kerja, meminta karyawan bekerja dari rumah, memberikan cuti, dan memberhentikan sejumlah karyawan. Gambar 1.19 menunjukkan dampak perubahan operasional dan perubahan pola pekerjaan yang terjadi pada UMKM.



Gambar 1.19 Dampak Covid-19 Terhadap Lingkungan Bisnis dan Pekerjaan UMKM [26]

Dengan menutup sementara kegiatannya, UMKM kesulitan memperoleh pendapatan dan pendanaan. Dampak ketiga dari pandemi ini memaksa UMKM mencari berbagai alternatif sumber pendanaan agar dapat menutup sejumlah biaya tetap di UMKM. Alternatif sumber pendanaan paling utama adalah dengan memanfaatkan cadangan laba/laba di tahan yang dimiliki UMKM, meminjam dari

keluarga, kerabat, dan teman, meminjam dari lembaga keuangan, serta menerima bantuan baik dari pemerintah maupun pihak lainnya. Dengan berbagai kesulitan-kesulitan serta risiko yang timbul, UMKM merespon kondisi yang ada dengan membatalkan sejumlah kontrak/transaksi, meminta keringanan pembayaran hutang dan pajak, melakukan pengurangan sejumlah tenaga kerja, mengurangi pemerian upah, dan yang terburuk adalah mengajukan kebangkrutan dan terpaksa menutup usaha mereka (Gambar 1.20).



Gambar 1.20 Sumber Pendanaan dan Respon UMKM Selama Pandemi [26]

Untuk tetap dapat bertahan selama masa krisis dan mempertahankan nilai daya saing UMKM, ITC menyampaikan 15 poin rencana aksi yang dapat dilakukan UMKM, Organisasi Pendukung, dan Pemerintah (Gambar 1.21). Dengan berbagai alternatif dan dukungan pemulihan untuk membangkitkan kembali UMKM, dapat dilakukan sejumlah adaptasi sebagai bagian dari perubahan. Agar mampu bertahan melewati krisis yang terjadi UMKM harus melakukan adaptasi

pada proses bisnis yang dilakukannya. Pemanfaatan platform digital menjadi pilihan utama dalam proses adaptasi kegiatan bisnisnya karena kondisi krisis mengharuskan setiap kegiatan bisnis mengurangi interaksi secara langsung. Selain itu, menjalankan proses bisnis yang berkelanjutan juga dapat menjadi alternatif bagi UMKM. Selama masa krisis, pendapatan UMKM mengalami penurunan. Sehingga, dukungan sumber pendanaan dari pemerintah dan organisasi non pemerintah akan membantu UMKM untuk dapat bertahan menghadapi krisis.



Gambar 1.21 Rencana Aksi bagi UMKM, Organisasi Pendukung, dan Pemerintah [27]

Untuk mengatasi krisis ekonomi selama pandemi, Pemerintah Indonesia meluncurkan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dituangkan dalam PERPU No. 1 Tahun 2020. Dalam program tersebut, berbagai stimulus keuangan diberikan untuk semua sektor tidak terkecuali UMKM. Hingga 23 Desember 2020, realisasi program PEN mencapai Rp502,71 Triliun atau 72,3% dari total yang dianggarkan sebesar Rp695,2 Triliun. Realisasi bantuan untuk

UMKM mencapai 92,8% atau Rp107,93 Triliun dari total alokasi anggaran UMKM sebesar Rp116,31 Triliun. Realisasi program untuk UMKM mencapai 100% Bantuan Produktif Pelaku Usaha Mikro, Restrukturisasi Kredit UMKM, dan Pembiayaan Investasi Melalui LPDB KUMKM. Sementara, realisasi program UMKM yang belum mencapai 100% adalah untuk Penjaminan Kredit UMKM yang mencapai 99,52%, PPh Final UMKM sebesar 96,10%, dan Subsidi Bunga 63% [28]. Pada Tahun 2021, pemerintah kembali menunjukkan komitmen dukungan kepada UMKM dengan memberikan stimulus keuangan sebesar Rp 48,8 Triliun [29].

Membangkitkan kembali potensi UMKM sebagai roda penggerak perekonomian di Indonesia akan membantu percepatan pencapaian SDGs. UMKM dapat menjadi pendorong percepatan pencapaian SDGs dengan menerapkan model bisnis yang berkelanjutan (*sustainable business model*). UNDESA mendefinisikan model bisnis yang berkelanjutan ditunjukkan dari kemampuan perusahaan dalam melakukan adaptasi model bisnis yang baru, melakukan inovasi dan penggunaan teknologi baru, seperti teknologi ramah lingkungan, dan melakukan bisnis secara berbeda yaitu dengan lebih berkelanjutan dan lebih beretika [15]. Berikut ini dipaparkan beberapa strategi yang dapat dilakukan UMKM untuk menggerakkan kembali roda perekonomian dan mendorong percepatan pencapaian tujuan-tujuan SDGs.

1) Digitalisasi UMKM

A. A. Widayasanti, Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas dalam salah satu webinar yang diadakan SMESCO menegaskan perlunya adaptasi UMKM Indonesia dalam menghadapi perubahan perilaku dan kebutuhan masyarakat akibat pandemi Covid-19 [30]. Adaptasi yang dapat dilakukan yaitu dengan memanfaatkan teknologi (digitalisasi) dari segi

pemasaran, distribusi, produksi, hingga sistem pembayaran. Adanya pembatasan sosial mengakibatkan perusahaan mengalami penurunan pendapatan. Pada awal masa pandemi, sebanyak 84,20% Usaha Mikro Kecil (UMK) dan 82,29% Usaha Menengah Besar (UMB) mengalami penurunan pendapatan. Sebanyak 8 dari 10 perusahaan baik UMK dan UMB mengalami penurunan permintaan karena pelanggan mereka juga terdampak pandemi [31]. Sampai dengan triwulan III tahun 2020, terdapat 67,77% UMK dan 57,29% UMB yang masih mengalami penurunan pendapatan [32].

Pandemi Covid-19 telah menyebabkan era digitalisasi datang lebih cepat dan mendorong UMKM beralih dari cara pemasaran konvensional menjadi pemasaran via *online*. Hasil survei BPS selama pandemi menemukan bahwa 47,75% dari perusahaan di Indonesia telah memanfaatkan pemasaran via *online*, sebanyak 5,76% perusahaan baru memanfaatkan internet dan TI untuk melakukan pemasaran saat pandemi, dan sisanya 46,5% perusahaan tidak/belum menggunakan pemasaran secara *online*. Dalam hasil surveinya, BPS menemukan bahwa perusahaan yang sudah menerapkan pemasaran *online* mempunyai pendapatan 1,14 kali lebih tinggi dibanding perusahaan yang baru *online* setelah pandemi terjadi [31]. Hal ini menunjukkan digitalisasi berperan membantu perusahaan termasuk UMKM untuk bertahan melewati krisis yang terjadi.

Riset dari *International Data Corporation* (IDC) dan Cisco menunjukkan, digitalisasi UMKM dapat meningkatkan pendapatan negara. Setidaknya Produk Domestik Bruto (PDB) bisa bertambah US\$ 160 miliar-US\$ 164 miliar (Rp 2.372,6 triliun-Rp 2.432 triliun) pada 2024 [33]. Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartato menyebutkan bahwa jika potensi digitalisasi Indonesia dapat dimaksimalkan maka diproyeksikan akan memberikan nilai ekonomi digital mencapai Rp 125 miliar di tahun 2025

[34].

Pemerintah melalui Kementerian UKM dan Koperasi telah meluncurkan program-program bagi UMKM untuk beralih ke platform digital. Diantaranya adalah mempermudah akses UMKM untuk masuk dalam pasar digital melalui Program UMKM Hub dan Bangga Buatan Indonesia. Kemenkop dan UMKM mengakselerasi Koperasi dan UMKM Go Digital melalui platform digital Edukukm.id sebagai sarana pembelajaran daring dan sarana pendampingan. Selain itu, pemerintah mendorong *startup digital* melalui Program Pahlawan Digital UMKM untuk membantu Digitalisasi UMKM bekerja sama dengan *startup digital* yang sudah berjalan. Kemudian juga ada pendampingan transformasi digital bersama SMESCO melalui program Kakak Asuh UMKM, penyediaan platform *e-brochure*, dan program daring SMESCO Sparc. Selama tahun 2020 tercatat sudah 8 juta atau sekitar 13% UMKM yang telah masuk (*onboarding*) dalam platform *e-commerce*. Jumlah ini mengalami kenaikan di tahun 2021, yaitu per Juni 2021 UMKM yang masuk dalam ekosistem digital telah mencapai 19% atau sebanyak 12 juta UMKM [35].

Adanya pemahaman pada kebutuhan pasar, akan membantu UMKM dalam melakukan inovasi digitalisasi produk dan pemasarannya [36]. Digitalisasi membantu UMKM memiliki kesempatan untuk memperluas pasar, dapat menjalankan proses bisnis dengan lebih efisien, dan tidak membutuhkan pembiayaan sebesar proses bisnis konvensional. Dengan digitalisasi dan pemanfaatan teknologi, UMKM berkontribusi dalam menjalankan bisnis berkelanjutan yang ramah lingkungan.

2) Kolaborasi dalam *supply chain* (rantai pasokan)

UMKM dapat melakukan kolaborasi dengan mitra dalam *supply chain*. Dengan kolaborasi, UMKM mendapat menjamin ketersediaan bahan baku atau sebaliknya UMKM mendapat jaminan penjualan/pelanggan sehingga UMKM tidak hanya menjadi penjual tetapi juga dapat menjadi produsen [30]. Apabila UMKM melakukan bisnis di bidang makanan, UMKM dapat melakukan kolaborasi dan membangun rantai pasokan dengan petani atau produsen lokal. Kolaborasi juga dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan mitra yang mempromosikan penggunaan kemasan ramah lingkungan.

Memberdayakan masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan pendapatan untuk menjadi *reseller* atau menjadi kurir dapat membantu masyarakat kembali mendapatkan pekerjaan dan tingkat kehidupan layak. UMKM pun dapat memperluas jaringan pasar dan meningkatkan produktivitasnya. Disini akan terjadi simbiosis mutualisme bagi UMKM dan masyarakat terdampak Covid-19 [36].

3) Inovasi dan diversifikasi

Selama pandemi, UMKM juga dituntut untuk melakukan inovasi dan modifikasi produk yang sesuai kebutuhan pasar saat ini serta yang ramah lingkungan untuk mendukung pencapaian TPB/SDGs. Selama masa pandemi dan masuk *new normal*, kebutuhan masyarakat mengalami perubahan dan terjadi perubahan tren pada pola konsumsi masyarakat. Kondisi ini dapat dimanfaatkan oleh UMKM sebagai peluang untuk melakukan inovasi dan menciptakan produk baru. Seperti kebutuhan akan masker, UMKM dapat melakukan inovasi dengan memproduksi masker untuk anak dan dewasa. Contoh lainnya adalah melakukan inovasi kebutuhan akan *hand*

sanitizer seperti memproduksi *hand sanitizer* dengan bahan baku yang alami. Diversifikasi produk dan jasa juga menjadi salah satu cara adaptasi bagi UMKM untuk bertahan di tengah pandemi. Dengan diversifikasi, UMKM dapat menawarkan produk dan jasa dengan keunikan/kekhasan yang tidak dimiliki pesaing sehingga konsumen bersedia mencari produk dan jasa yang ditawarkan UMKM [37]. Namun, sebelum melakukan diversifikasi, perusahaan harus menganalisis aspek keuangan dan non keuangan yang ada di perusahaan. Aspek non keuangan mencakup analisis terhadap perilaku konsumen, potensi pasar perusahaan, pesaing, operasional, dan personil yang ada di perusahaan, sementara aspek keuangan mencakup analisis terhadap kinerja keuangan perusahaan [38].

Hasil survei BPS terhadap perusahaan yang memanfaatkan internet dan TI, ditemukan sebanyak 27,45% perusahaan telah melakukan diversifikasi, 9,9% melanjutkan usaha di bidang yang berbeda, dan 62,64% tetap melakukan usaha di bidang yang sama. Hasil survei tersebut juga menunjukkan bahwa 45,19% dari pelaku usaha yang melakukan diversifikasi usaha memiliki optimisme bahwa usaha mereka akan mampu bertahan lebih dari 3 bulan. Sementara sebanyak 43,98% percaya perusahaan mereka hanya mampu bertahan antara 1-3 bulan dan 10,83% hanya mampu bertahan kurang dari 1 bulan [31].

4) *Circular Economy* (ekonomi sirkular) sebagai bisnis model

Perekonomian dunia telah banyak mengalami perubahan besar mulai dari penerapan ekonomi linear, ekonomi daur ulang, dan kemudian berkembang menjadi ekonomi sirkular. Konsep ekonomi linear mengusung konsep *take-make-consume-waste*. Konsep ekonomi linear dipandang sebagai konsep ekonomi yang tidak berpihak pada keberlangsungan lingkungan. Dalam

konsep ekonomi linear kegiatan produksi dilakukan dengan mengambil sumber daya alam secara terus menerus dan ketika hasil akhir selesai dikonsumsi akan menghasilkan sampah yang merusak lingkungan, seperti sampah plastik, sampah bahan kimia dan beracun, serta tingginya polusi sehingga mengganggu keseimbangan keanekaragaman hayati. Konsep ekonomi kemudian berkembang menjadi ekonomi daur ulang. Konsep ekonomi daur ulang menjadi alternatif perbaikan dari ekonomi linear. Sebelum menjadi sampah, sisa produk yang telah dikonsumsi dipilah dan dipisahkan untuk didaur ulang dan dimanfaatkan kembali dalam proses produksi. Namun, konsep ekonomi daur ulang pada akhirnya tetap masih menghasilkan sampah.

Konsep ekonomi sirkular diperkenalkan oleh Ellen Macarthur Foundation sejak 2009, tetapi konsep ini baru mulai diperkenalkan di Indonesia pada tahun 2018-2019 [39]. Ekonomi sirkular merupakan pendekatan usaha dimana sumber daya diolah dan dimanfaatkan untuk menghasilkan nilai dan memiliki masa konsumsi yang paling maksimal, kemudian diproses kembali di akhir masa pemakaiannya sehingga membentuk suatu proses ekonomi yang berkelanjutan [40]. Konsep ekonomi sirkular merupakan konsep ekonomi terbaru yang mulai diterapkan sebagai bagian untuk melakukan pembangunan berkelanjutan. Ekonomi sirkular memiliki prinsip 5R, yang mencakup *reduce* yang berarti mengurangi pengambilan sumber daya dari alam, *reuse* yaitu mengoptimalkan pemakaian material yang dapat digunakan kembali, *recycle* yaitu melakukan daur ulang atas sisa pemakaian produk, *recovery* yaitu dipulihkan dan digunakan kembali, dan *repair* yaitu memperbaiki untuk dapat digunakan kembali [41].

UMKM dapat memanfaatkan peluang pada masa pandemi ini dengan melakukan kolaborasi masuk dalam proses bisnis yang mengarah pada

ekonomi sirkular. Contohnya adalah seperti yang dilakukan Garda Pangan. Garda Pangan merupakan organisasi yang berfungsi sebagai bank makanan dengan menerima makanan lebih dari restoran, katering, bakery, hotel, lahan pertanian, dan pihak manapun yang kemudian melalui serangkaian uji kelayakan makanan untuk disalurkan pada masyarakat pra-sejahtera [42]. UMKM dapat berkolaborasi dengan menjadi rekanan yang mendonasi makanan, dana, merekomendasikan golongan masyarakat pra-sejahtera, atau menjadi relawan. Dengan masuk pada model bisnis ekonomi sirkular, UMKM dapat turut berperan serta mempercepat pencapaian tujuan-tujuan SDGs.

5) Dukungan pendanaan

Tujuan dari SDGs adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan menyeluruh melalui penciptaan kesempatan kerja dan kehidupan layak untuk semua. UMKM memiliki potensi besar untuk menjadi roda penggerak pemulihan ekonomi nasional dan mendorong percepatan pencapaian target-target SDGs di Indonesia. Burger et al. (2015) dalam penelitiannya menyimpulkan empat tantangan UMKM Indonesia, yaitu adanya hambatan/akses layanan keuangan, akses untuk mendapatkan bahan mentah, akses ke pasar dan permintaan, serta permasalahan pada kualitas tenaga kerja dan sumber daya manusia. Dalam Peta Jalan SDGs Indonesia, disebutkan bahwa UMKM memiliki potensi dalam mengakses layanan keuangan di tahun 2030 antara hingga 41,60% [43]. Dukungan akses pendanaan akan membantu UMKM membangun nilai kompetitif yang dimilikinya. UMKM yang memiliki nilai kompetitif secara tidak langsung akan mendorong percepatan pencapaian SDGs [5]. Selain kemudahan dalam akses keuangan, selama masa pandemi UMKM dapat memanfaatkan bantuan pendanaan dari pemerintah yang disediakan dalam program PEN.

6) *Crowdfunding* sebagai alternatif pendanaan UMKM

Crowdfunding merupakan alternatif bentuk pendanaan untuk membantu membiayai pengembangan usaha khususnya bagi yang baru berjalan/para pemula. *Crowdfunding* dilakukan melalui platform digital dengan mengumpulkan sejumlah dana dari banyak orang sebagai penanam dana [44]. Bagi pelaku usaha, *crowdfunding* menjadi alternatif sumber pendanaan yang dapat diakses dengan mudah dan dapat menjadi tempat untuk mempromosikan konsep bisnis yang akan dijalankannya dengan prosedur yang lebih mudah dari pembiayaan tradisional [45].

Crowdfunding dapat berbentuk *donation*, *reward*, *pre-purchase*, *lending (peer-to peer)*, dan *equity* [46]. *Donation* atau sumbangan berarti kontributor tidak mengharapkan adanya pengembalian dari pelaku usaha karena dana yang diberikan adalah untuk amal dan membantu kegiatan sosial. Dalam *reward* pelaku usaha akan memberikan pengembalian kepada pemberi dana dalam bentuk tertentu yang disepakati, sementara *pre-purchase* pemberi dana mendapatkan pengembalian dalam bentuk produk yang dikembangkan pelaku usaha. *Peer-to peer* merupakan pinjaman, maka pemberi dana akan memperoleh pendapatan dari pemberian pinjaman tersebut, sementara pada *equity* pemberi dana akan mendapatkan keuntungan karena sudah memberikan penyertaan modal kepada pelaku usaha.

Untuk mendapatkan pendanaan melalui *crowdfunding*, pelaku usaha dan UMKM harus menjajaki terlebih dahulu apakah platform tersebut dapat dipercaya atau tidak. Di Indonesia, ada beberapa platform *crowdfunding* yang telah terbukti aman dan terpercaya, yaitu Kolase.com, Akseleran, Kitabisa.com, Ayopeduli.id, dan Gandeng Tangan [47]. Dengan melihat pada

karakteristiknya, *crowdfunding* dapat menjadi solusi masalah keuangan bagi UMKM khususnya di masa pandemi ini. Melalui *crowdfunding*, UMKM dapat memperoleh tambahan dana dengan mudah, cepat, dan juga murah. Sementara, bagi penanam dana, *crowdfunding* dapat menjadi wadah melakukan diversifikasi investasi serta sebagai wadah untuk melakukan kegiatan kemanusiaan.

7) Menerapkan Protokol Kesehatan

Dari hasil survei BPS pada triwulan III tahun 2020, sebanyak 60,47% UMK sudah menerapkan protokol kesehatan 3M secara menyeluruh, 24,55% sudah menerapkan sebagian protokol kesehatan 3M, dan 14,98% belum menerapkan seluruhnya. Sebanyak 85,22% UMB sudah menerapkan protokol kesehatan 3M secara menyeluruh, 10,09% menerapkan sebagian, dan 4,69% belum menerapkan seluruh protokol kesehatan 3M. Pada semua perusahaan yang sudah menerapkan sebagian protokol 3M, sebanyak 65,71% belum menerapkan jaga jarak dan menghindari kerumunan, 32,71% belum menerapkan pemakaian masker, dan 28,64% belum menerapkan protokol mencuci tangan [32].

Fasilitas kesehatan yang paling banyak disediakan oleh perusahaan adalah masker yang mencapai 96,74% perusahaan telah menyediakan fasilitas masker bagi karyawan. 28,90% perusahaan telah menyediakan suplemen/vitamin, 25,02% menyediakan *face shield*, dan 5,40% menyediakan APD. Sementara penyediaan fasilitas *rapid test* untuk karyawan baru dilakukan oleh 6,98% perusahaan, dan *swab/PCR test* baru disediakan oleh 0,02% perusahaan [32].

Meskipun UMKM dapat mengalihkan proses bisnisnya secara digital, namun

ada sejumlah UMKM yang tetap perlu melakukan proses bisnisnya secara langsung. Penerapan standar keamanan produk dan protokol kesehatan menjadi pilihan utama tidak hanya bagi UMKM tapi juga pelaku usaha di sektor yang lain. Sejumlah adaptasi kebiasaan baru dalam menjaga kebersihan akan membantu pelaku UMKM dan masyarakat tetap sehat.

Adaptasi kebiasaan baru yang dapat dilakukan diantaranya adalah dengan membersihkan atau melakukan disinfeksi pada tempat usaha secara berkala, mewajibkan penggunaan masker bagi pelaku UMKM dan pelanggan, menyediakan sarana cuci tangan dan menyediakan *hand sanitizer*, menggunakan sarung tangan apabila proses bisnis UMKM berkaitan dengan makanan, memastikan pelaku UMKM dan masyarakat menjaga jarak dengan memberlakukan antrian pada saat transaksi, serta memanfaatkan pembayaran non-tunai untuk mengurangi kontak fisik. Terjaganya kesehatan, para pelaku UMKM dan masyarakat dapat tetap beraktivitas dan produktif yang berarti ikut mendorong percepatan pencapaian SDGs.

1.3 Penutup

Terpuruknya kondisi perekonomian selama pandemi Covid-19 juga berdampak pada UMKM. Untuk menyelamatkan kondisi perekonomian, Pemerintah Indonesia mencanangkan Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang salah satunya adalah program pemulihan untuk UMKM. Peran UMKM dalam pemulihan ekonomi nasional sangat besar peranannya mengingat populasi UMKM di Indonesia yang mencapai 99,99% dari seluruh industri di Indonesia.

UMKM dituntut untuk mampu beradaptasi dan melakukan strategi-strategi pemulihan. Menjalankan model bisnis berkelanjutan menjadi alternatif utama yang dapat dilakukan UMKM. Beberapa strategi yang dapat dilakukan UMKM untuk menggerakkan kembali roda perekonomian di Indonesia adalah dengan melakukan digitalisasi dalam proses bisnisnya, melakukan kolaborasi dengan masuk dalam *supply chain*, melakukan inovasi dan diversifikasi, masuk dalam proses bisnis yang menerapkan ekonomi sirkular, mengakses dukungan pendanaan dari pemerintah ataupun alternatif pendanaan seperti *crowdfunding*, serta menerapkan protokol kesehatan.

Dengan mampu beradaptasi terhadap perubahan dunia usaha selama dan setelah pandemi Covid-19 diharapkan UMKM dapat bangkit kembali seperti sebelum terjadinya pandemi, bahkan menjadi lebih maju. Dengan pulihnya perekonomian nasional akan membawa dampak positif pada pencapaian target-target SDGs. Pencapaian target-target dalam SDGs dapat tetap dilaksanakan searah dengan Peta Jalan (*Road Map*) yang telah direncanakan yang mengarah pada “*Build Back Better*”.

Referensi

- [1] World Commission on Environment and Development, 1987, *Our Common Future* (Oxford:Oxford University Press)
- [2] Elkington, J., 1998, *Cannibals with forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Businesses* (Gabriola Island, BC Canada: New Society Publishers)
- [3] <http://sdgs.bappenas.go.id/sekilas-sdgs/>
- [4] Kementerian Koperasi dan UKM, 2020, *Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Dan Usaha Besar (UB) Tahun 2018-2019* (Kemenkop dan UKM).
- [5] International Trade Centre (ITC), 2019, *SME Competitiveness Outlook 2019: Big Money for Small Business – Financing the Sustainable Development Goals* (ITC: Geneva). [6] <https://www.icctf.or.id/sdgs/>
- [7] Kementerian PPN/Bappenas, 2020, *Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia Pilar Pembangunan Sosial Edisi II* (Kementerian PPN/Bappenas).
- [8] Kementerian PPN/Bappenas, 2020, *Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia Pilar Pembangunan Ekonomi Edisi II* (Kementerian PPN/Bappenas).
- [9] Kementerian PPN/Bappenas, 2020, *Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia Pilar Pembangunan Lingkungan Edisi II* (Kementerian PPN/Bappenas).
- [10] Kementerian PPN/Bappenas, 2020, *Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia Pilar Pembangunan Hukum Dan Tata Kelola Edisi II* (Kementerian PPN/Bappenas).
- [11] Kementerian PPN/Bappenas, 2020, *Pedoman Teknis Penyusunan Rencana*

Aksi - Edisi II Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) (Kementerian PPN/Bappenas).

- [12] <https://www.gatra.com/detail/news/485592/ekonomi/peringkat-indeks-sdgs-2020-di-indonesia-meningkat>
- [13] Kementerian PPN/Bappenas, 2019, *Ringkasan Eksekutif Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Tahun 2019* (Kementerian PPN/Bappenas).
- [14] Kementerian PPN/Bappenas, 2021, *Indonesia's Voluntary National Review 2021: Sustainable and Resilient Recovery from the Covid-19 Pandemic for the Achievement of the 2030 Agenda* (Kementerian PPN/Bappenas).
- [15] United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA), 2020, *Micro-, Small, and Medium-sized Enterprises (MSMEs) and their role in achieving the Sustainable Development Goals* (UNDESA).
- [16] <https://oecd-development-matters.org/2019/04/23/smes-and-sdgs-challenges-and-opportunities/>
- [17] <https://katadata.co.id/yuliawati/berita/5f32ae9109931/pelaku-umkm-perempuan-terus-bertambah-butuh-perhatian-pemerintah>
- [18] United Nations, 2020, *Shared Responsibility, Global Solidarity: Responding to the socio-economic impacts of COVID-19* (United Nations).
- [19] Filho, W. L., Brandli, L., Salvia, A., Bacchus, L. M. R., & Platje, J., 2020, COVID-19 and the UN Sustainable Development Goals: Threat to Solidarity or an Opportunity?. *Sustainability* 2020, 12, 5343. doi:10.3390/su12135343.
- [20] Badan Pusat Statistik, 2021, *Berita Resmi Statistik 15 Februari 2021* (Badan Pusat Statistik).
- [21] <https://www.cnbcindonesia.com/market/20200227113256-17-140811/terparah-di-bei-kapitalisasi-sektor-manufaktur-raib-rp-309-t>
- [22] <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/21/sebanyak-1459-tenaga-kesehatan-meninggal-akibat-covid-19>

- [23] <https://www.tribunnews.com/pendidikan/2021/08/11/akses-pendidikan-di-masa-pandemi- masih-timpang-apa-langkah-selanjutnya>
- [24] <https://www.pantau.com/topic/visual/infografis-5-dampak-positif-covid-19-bagi-lingkungan-dan-kehidupan-di-bumi>
- [25] <https://www.liputan6.com/global/read/4217476/headline-polusi-udara-sejumlah-negara- turun-saat-pandemi-corona-bagaimana-indonesia>
- [26] Park, C. Y. & Shinozaki, S., 2020, Micro, Small, and Medium Sized-Enterprises: Policy Measures for COVID-19, *Navigating Covid-19 in Asia and The Pacific* (Asian Development Bank).
- [27] International Trade Centre, 2020, *Supporting Small Business Through The COVID-19 Crisis And Towards The Future: A 15-Point Action Plan, 2020* (ITC: Geneva).
- [28] https://www.kominfo.go.id/content/detail/32192/perindungan-umkm-program-pemulihan- ekonomi-nasional/0/artikel_gpr
- [29] <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5305199/anggaran-pemulihan-ekonomi-2021-capai-rp-372-t-ini-rinciannya>
- [30] Widayasanti, A. A., 2020, Ekonomi Indonesia di Tengah Pandemi, *Loka Hejo Conference "DARI SMESCO UNTUK UMKM INDONESIA"*, 7 November 2020 (Kementerian PPN/Bappenas).
- [31] Badan Pusat Statistik, 2020, *Analisis Hasil Survei Dampak Covid-19 Terhadap Pelaku Usaha* (BPS).
- [32] Badan Pusat Statistik, 2020, *Analisis Hasil Survei Dampak Covid-19 Terhadap Pelaku Usaha Jilid II* (BPS).
- [33] <https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/5f58bbb66cf35/riset-umkm-digital-bisa- dongkrak-pdb-ri-rp-2432-triliun-pada-2024>
- [34] <https://www.tribunnews.com/bisnis/2021/03/16/ini-strategi-pemerintah-pulihkan-umkm-di- tengah-pandemi-covid-19>

- [35] Kementerian Koperasi dan UMKM, 2021, *Press Release: Target Pemerintah 30 Juta UMKM Masuk Ekosistem Digital Pada Tahun 2024* (Kemenkop dan UMKM).
- [36] Ngatindriaturn, Pertiwi, N. A. dan Leha, A., 2021, Meningkatkan Produktivitas UMKM Dalam Rangka Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, *UMKM: Jejak, Aksi dan Solusi Saat Pandemi, Sebuah Antologi ISEI Bagi Negeri* (Fastindo: Semarang).
- [37] Wahyuningtyas, I. K., 2020, Strategi Bisnis UMKM Di Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal Daya Saing*, Vol. 6, No. 3, Oktober 2020.
- [38] Mutamimah dan Muharam, H., 2021, Strategi Mitigasi Risiko Bisnis Bagi UKM Di Era Covid-19 Berbasis Diversifikasi Terintegrasi, *UMKM: Jejak, Aksi dan Solusi Saat Pandemi, Sebuah Antologi ISEI Bagi Negeri* (Fastindo: Semarang).
- [39] <https://waste4change.com/blog/5-tantangan-dalam-mengimplementasikan-ekonomi-sirkular/>
- [40] <https://www.facebook.com/kemenkopukm/posts/penerapan-ekonomi-sirkular-membantu-pelaku-usaha-untuk-mengoptimalkan-sumber-day/1683029365198154/>
- [41] Kementerian Perindustrian RI, 2019, Siaran Pers: Industri Berperan Ciptakan Indonesia Bersih Lewat Konsep ‘Circular Economy’ (Kemenperin).
- [42] <https://gardapangan.org/>
- [43] Burger, N., C. Chazali, A. Gaduh, A.D. Rothenberg, I. Tjandraningsih and S. Weilant., 2015, *Reforming Policies for Small and Medium Enterprises in Indonesia*, Jakarta, Indonesia, RAND Corporation in collaboration with Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Jakarta, Indonesia.
- [44] <https://en.wikipedia.org/wiki/Crowdfunding>


- [45] Hijadat, T., 2021, Model Peningkatan Inklusi Keuangan UMKM Melalui Crowdfunding Berbasis Prinsip Bagi Hasil, *UMKM: Jejak, Aksi dan Solusi Saat Pandemi, Sebuah Antologi ISEI Bagi Negeri* (Fastindo: Semarang).
- [46] Harrison, R., 2013, Crowdfunding and the revitalisation of the early stage risk capital market: catalyst or chimera, *International Journal of Entrepreneurial Finance*, Volume 15, 2013 - Issue 4
- [47] <https://cerdasbelanja.grid.id/read/522508155/ini-beberapa-platform-crowdfunding-yang-cocok-untuk-menggalang-dana?page=all>

Profil Penulis

Henny Wirianata, S.E., M.Si., Ak., CA., CSRS.



Henny Wirianata menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi di Universitas Tarumanagara tahun 1999 dan Magister Sains dari Universitas Trisakti dengan konsentrasi Pemeriksaan Akuntansi dan Akuntansi Keuangan pada tahun 2005. Berpengalaman bekerja sebagai Accounting Staff di PT Monysaga Prima Jakarta pada tahun 2000. Tahun 2017 mengikuti GRI Certified Training Course dan mendapatkan sertifikasi Certified Sustainability Reporting Specialists (CSRS). Karir dalam bidang pendidikan pernah menjabat sebagai Kepala Laboratorium Akuntansi Manajemen FE Untar periode 2008 - 2012 dan sejak tahun 2018 menjabat sebagai Sekretaris II Prodi S1 Akuntansi FEB Untar.



PENERBIT
Lembaga Penelitian dan
Publikasi Ilmiah
Universitas Tarumanagara

PENERBIT

Jln. Letjen S. Parman No. 1
Kampus I UNTAR
Gedung M Lantai 5
Jakarta Barat

Telp: 021-5671747, ext215

Email: publikasi@untar.ac.id

